

Evaluasi Implementasi Penanganan Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

Aldriea Audria Araminta Enoch^{*}, Tarlani Tarlani

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} revaenoch@gmail.com, tarlaniakademik@gmail.com

Abstract. In general, this study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of socio-economic management due to the Covid-19 pandemic that has been carried out by the government. The impact of the Covid-19 pandemic which can simultaneously reduce the economy makes the government have to take the right and fast decisions. Indonesia was able to soften the Covid-19 pandemic through the PEN program which has become the center of attention of several countries, such as America. Bandung is the city with the highest population density on the island of Java and the performance of the Bandung city government is ranked first in accelerating the handling of Covid-19. The research method uses qualitative research methods. The data analysis used by the researcher is Comparative Analysis and LFA (Logical Framework Analysis). Evaluation of the results of the implementation of the handling of social impacts in the City of Bandung shows that the handling carried out by the government has not been optimal in dealing with problems caused by the Covid-19 pandemic. This is due to government decision-making that hampers economic growth, limited use of technology, and limited health services.

Keywords: *Evaluation, Handling the Impact of Covid-19, Socio-Economic and Government.*

Abstrak. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan penanganan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah. Dampak pandemi Covid-19 yang mampu menurunkan perekonomian secara serentak membuat pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Indonesia mampu melunakan pandemi Covid-19 melalui program PEN menjadi pusat perhatian beberapa negara, seperti Amerika. Kota Bandung merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di pulau Jawa dan kinerja pemerintah kota Bandung menduduki peringkat pertama dalam percepatan penanganan Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis Komparatif dan LFA (Logical Framework Analysis). Evaluasi terhadap hasil capaian dari implementasi penanganan dampak sosial Kota Bandung menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah belum optimal dalam menangani permasalahan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan pengambilan keputusan pemerintah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, adanya keterbatasan pemanfaatan teknologi, dan layanan kesehatan yang terbatas.

Kata Kunci: *Evaluasi, Penanganan Dampak Covid-19, Sosial Ekonomi dan Pemerintah..*

A. Pendahuluan

Keberadaan Covid-19 yang membahayakan dan misterius masih menjadi hal yang perlu ditakuti oleh semua orang. Coronavirus disease 2019 atau yang biasa disebut dengan Covid-19 merupakan jenis virus yang berasal dari virus SARS-CoV 2. Kasus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei sebagai kasus pneumonia pada Desember 2019 (1). Tidak sampai disitu virus ini berkembang menyebar hingga ke berbagai wilayah lainnya di China hingga ke Thailand, Jepang dan Korea Selatan. Berdasarkan sejarahnya, Covid-19 merupakan virus yang telah berkembang semenjak tahun 1960 dan memiliki mortalitas yang terbilang tinggi. WHO menetapkan Covid-19 sebagai “global health of emergency concern”.

Keberadaan pandemi Covid-19 juga mengancam kondisi perekonomian dan kondisi masyarakat. Terjadi penyusutan ekonomi global sebesar 5%-6% (2). Perekonomian mengalami penurunan karena banyak sektor ekonomi harus di non aktivasikan, seperti pariwisata, penerbangan, ekspor-impor dikala penguncian yang ketat (3). Resesi ekonomi ini akan meninggalkan bekas luka pada aspek sosial dan masyarakat (4). Masyarakat harus menghadapi kondisi baru, yaitu penguncian atau yang biasa disebut dengan lock down. Ancaman yang dirasakan oleh masyarakat ncaman yang dirasakan oleh masyarakat adalah, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, kesulitan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan (3).

Untuk menekankan dampak pada masyarakat akibat pandemi Covid-19 tersebut dapat dilakukan dengan penanganan yang responsif seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pada The World Bank dan nternational Monetary Fund sepakat, bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia membuat resesi yang dialaminya tidak separah negara lain, data menunjukkan Indonesia hanya mengalami penurunan -2% yang bila dibandingkan dengan negara dengan perekonomian yang maju, sepert Amerika,i Inggris, Jepang dan Canada yang rata-ratanya menurun perekonomiannya sebesar -6% (4) (2) .

Dukungan finansial merupakan kunci pananganan resesi yang lebih tajam yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan perubahan APBN, Indonesia berkomitmen untuk memerangi Covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan menguatkan pelayanan kesehatan serta memberikan dukungan finansial kepada rumah tangga. Indonesia melakukan penangguhan pagu defisit anggaran untuk pra-pandemi sebesar 3 persen dari PDB hingga 2023 untuk mengkondoliasi keuangan publik (2), dari total GDP tersebut perlindungan sosial merupakan sektor utama yang menjafi prioritas perlindungan dampak pandemi Covid-19.

Lockdown merupakan progam keputusan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan berdasarkan situasi dan keinginan pemerintah sehingga menyebabkan pembatasan pergerakan manusia dan pelambatan aktivitas industri (5). Pulau Jawa merupakan kontributor terbesar pada perekonomian Indonesia, sebanyak 58% terhadap pembentukan PDB Nasional dibandingkan 5 pulau lainnya (6). Pulau Jawa mengalami penurunan -2.51% berdasarkan PDRB menurut pulau ditahun 2020. Sebanyak 58% penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa dan (7). Melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020, sejumlah 9 provinsi disetujui melakukan PSBB dan 4 diantaranya merupakan provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Dalam hasil evaluasi Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dikategorikan sebagai kinerja Gugus Tugas Covid-19 peringkat pertama pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19 (Dialogpublik.com, 2020). Pada masa pandemi Covid-19, Kota Bandung mengalami penurunan ekonomi sebesar -2.28% dan peningkatan angka pengangguran sebesar 11.19 persen pada tingkat pengangguran terbuka (6).

Evaluasi merupakan alat ukur keberhasilan dan sekaligus pemberian masukan dalam rangka penciptaan keadaan yang lebih baik. Efektivitas suatu kebijakan akan sangat bergantung oleh pelaku kebijakan itu sendiri (level dan isi) dan lingkungan kebijakan (8). Hal itu dapat dijelaskan melalui prosesnya, proses kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dalam islam penting seorang muslim memepriapkan hari esok, hal tersebut diriwayatkan pada surat Al-Anfal ayat 60. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana penanganan dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah mengukur keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan permasalahan.

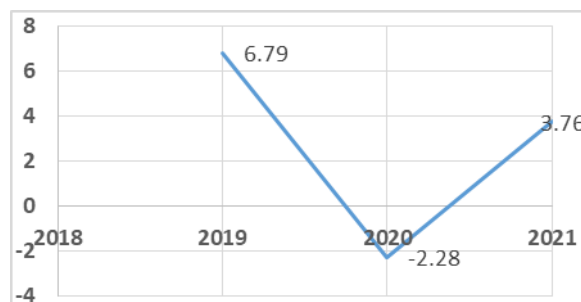
B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis komparatif dan LFA (Logical Framework Approach). Analisis komparatif dilakukan dengan batasan 3 dimensi, yaitu Pemulihan Ekonomi, Terjaminnya Rumah Tangga dan Technology Transformation yang bersumber dari OJK (9), OECD (10), Unicef (11), IMF (2), ILO (12), The World Bank Indonesia (4), T. Ibn Mohammed et al (13) dan Barman et al (14), sehingga menurut Dunn (1981), pendekatan evaluasi ini adalah semu evaluation.

Data diambil dengan survey instasional Bappelitbang Kota Bandung, Wawancara Bappelitbang Kota Bandung, studi pustaka dan Kuesioner. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampling acak sederhana. Diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 100 rumah tangga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Covid-19 di Kota Bandung pertama kali ditemukan pada tanggal 17 Maret 2020. Untuk mencegah penyebaran virus dan dampaknya, Pemerintah Kota Bandung menyusun strategi dengan menetapkan kebijakan sebagai penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Kota Bandung membentuk satuan gugus atau yang disingkat Satgas untuk menangani Covid-19 yang disebut dengan Satgas Penanganan Pandemi Covid-19, satgas yang dibentuk oleh pemerintah Kota Bandung terbagi kedalam 2 unit, yaitu Satgas penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Kota Bandung Tahun 2019-2021

Kota Bandung mengalami kontraksi di tahun 2020, ketika pandemi mulai menyebar di Kota Bandung. Namun dua tahun setelah pandemi Kota Bandung mengalami pertumbuhan sebesar 3.76 persen. Selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021, Kota Bandung mengalami peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2020 merupakan tahun yang peningkatannya terbilang besar dari pada tahun sebelumnya (8.16 persen), yaitu sebesar 11.19 persen. Pada tahun 2021 Kota Bandung masih mengalami peningkatan pengangguran, yaitu sebesar 11.46 persen.

Pemerintah Kota Bandung melakukan refocusing anggaran sebagai kebijakan penganggaran kebutuhan pada penanganan pandemi Covid-19 yang terdiri dari bantuan jaringan pengaman sosial, bantuan penanganan kesehatan, dan operasional gugus tugas dengan jumlah Rp. 210.000.000.000.

Terdapat 5 sampai 6 Program Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bandung. Kelompok sasaran bantuan adalah (DTKS), non-DTKS dan penduduk lain yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam memudahkan mobilitas dan transparansi, Kota Bandung menyediakan layanan publik dalam bentuk media website <https://jps.bandung.go.id>.

Analisis Komparatif dan Analisis Masalah Dimensi Pemulihan Ekonomi

Berikut adalah penelitian mengenai capaian dimensi pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Indikator ketercapaian pemulihan ekonomi ditandai dengan peningkatan pada PDB dan income masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh memberikan hasil LPE Kota Bandung meningkat sebesar 3.76 persen. Peningkatan tersebut belum memenuhi angka yang diproyeksikan oleh IMF, yaitu sebesar 6 persen. Sedangkan pada peningkatan konsumsi masyarakat dinyatakan tercapai. Indikator kedua adalah meningkatnya income masyarakat, hal ini ditandai dengan capaian rata-rata kontribusi pengeluaran masyarakat Kota Bandung mencapai 58 persen dan juga meningkatnya daya beli masyarakat Kota Bandung pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp16.996 rupiah/orang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan Rp108 rupiah/orang. The World Travel and Tourism Council (WTTC) mengestimasi terjadi penundaan perjalanan wisata sebanyak 25% di awal tahun pandemi (15). Berdasarkan laporan Beppelitbang Kota Bandung, Indeks daya saing pariwisata Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0.12%, hal tersebut terjadi karena menurunnya wisatawan dan terganggunya pengadaan barang dan jasa.

Kota Bandung merupakan kota dengan kepadatan tertinggi di Kota Bandung, untuk mencegah penyebaran yang lebih luas pemerintah Kota Bandung melakukan perketatan 100% yang sebelumnya melalui pemerintah pusat diarahkan untuk melakukan pembatasan sebesar 50%. Perketatan juga dilakukan dengan menutup jalan pada pusat keramaian. Perketatan jalan dipilih berdasarkan lokasi dengan mobilitas tinggi, penetapan penutupan ruas jalan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh TNI, Polisi dan penegak hukum terkait. Berdasarkan Peta Rencana Struktur Ruang, Ring 1 merupakan kawasan Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi. Sedangkan jalan yang ditutup pada ring 2 merupakan jalan menuju Ring 1.



Gambar 2. Pohon Masalah Dimensi Pemulihan Ekonomi

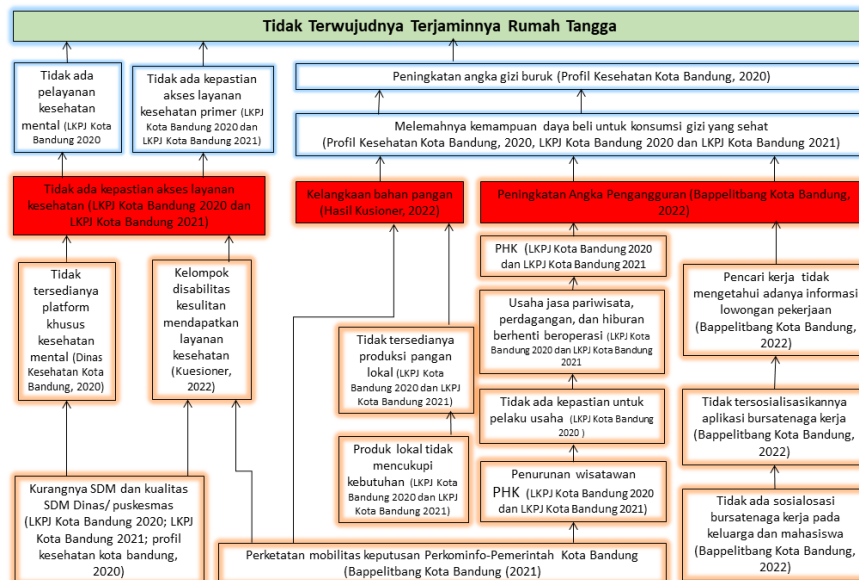
Analisis Komparatif dan Analisis Masalah Dimensi Terjaminnya Rumah Tangga

Dimensi terjaminnya rumah tangga dinilai melalui empat kriteria, hal tersebut untuk melihat perlindungan, pengalokasian, fasilitas dan pemenuhan kebutuhan yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani krisis dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tingginya angka pengangguran dapat dipengaruhi dua hal, yaitu masih rendahnya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh bursa dan kurang tersosialisasikannya aplikasi lapangan pekerjaan, terutama dikalangan keluarga dan mahasiswa sehingga banyak yang tidak mengetahui lowongan pekerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan, pemerintah mengarahkan pengembangan ekonomi kreatif dikalangan masyarakat untuk pemanfaatan ekonomi lokal namun banyak masyarakat yang belum siap pada kondisi pandemi yang harus memanfaatkan

teknologi.

Kota Bandung memiliki ketergantungan yang tinggi pada wilayah luar dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Hal ini diperkuat pada data Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bandung tahun 2019-2021, pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan ditahun 2020 dan 2021, yaitu minus 6.7 persen (tahun 2020) dan minus 0.99 (tahun 2021). Kemudian berdasarkan kuesioner, sebanyak 54% rumah tangga mengaku kesulitan mendapatkan bahan pangan karena ketersediannya yang langka dan harganya yang dianggap mahal.

Berdasarkan data kuesioner, terdapat 21 rumah tangga dengan anggota disabilitas 52% mengaku kesulitan akses ke layanan kesehatan, dikarenakan adanya terbatasnya rumah sakit, puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang tersedia di Kota Bandung yang berfokus pada penanganan Covid-19. Berdasarkan kuesioner, sebanyak 35% rumah tangga mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehingga melakukan pengurangan porsi makan. Adanya kebutuhan kuota dan internet juga menjadi salah satu alasan masyarakat merubah pola makan, karena kepemilikan uang yang tidak cukup mendorong masyarakat untuk membuat strategi perubahan pola makan untuk mencukupi kebutuhan yang lainnya. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bandung tahun 2020, menunjukkan, bahwa lapangan usaha informasi meningkat, terutama pada tahun 2020, yaitu sebesar 32.26%.

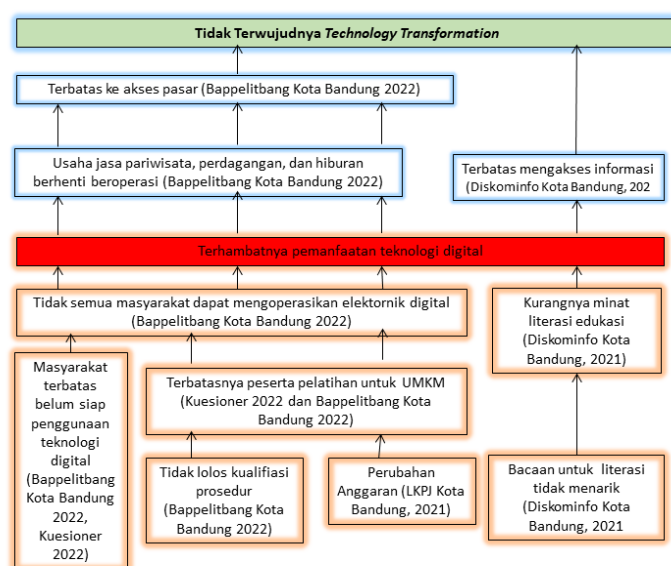


Gambar 3. Pohon Masalah Dimensi Pemulihan Ekonomi

Analisis Komparatif dan Analisis Masalah Dimensi Terchnology Transformation

Dimensi terjaminnya rumah tangga dinilai melalui empat kriteria, hal tersebut untuk melihat perlindungan, pengalokasian, fasilitas dan pemenuhan kebutuhan yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani krisis dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah telah melakukan pengembangan teknologi terutama untuk pelaku usaha dengan memberikan pelatihan. Namun ternyata banyak masyarakat yang belum bisa lulus kualifikasi karena belum bisa memenuhi prosedur kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena pelatihan dan pembimbingan yang diberikan pada pelaku usaha yang terpilih saja.

Selain itu juga, berdasarkan kuesioner dan melalui wawancara tersebut ditemukan rumah tangga yang belum memiliki gawai dan kesulitan mendapatkan internet sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh narasumber wawancara, bahwa hal tersebut menghambat pemanfaatan teknologi terutama untuk pelaku usaha.



Gambar 4. Pohon Masalah Dimensi Pemulihan Ekonomi

Analisis Strategi FLA

Permasalahan yang telah dipaparkan melalui analisis komparasi dan masalah dapat diselesaikan dengan beberapa strategi. Strategi tersebut didapati melalui mirroring pohon masalah yang dijadikan beberapa kategori strategi. Terdapat 8 strategi yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Kota Bandung. Analisis pohon strategi dapat dilihat pada gambar Berikut adalah penjabarannya:

1. Penyesuaian arahan pemerintah pusat untuk melakukan pelonggaran mobilitas pada ring 3 dan jalur tol atau transportasi sebagai cara untuk melancarkan pengiriman dan pembuatan serta peningkatan wisata agar terjadi penguatan daya beli masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena pada perketatan mobilitas pada lokasi tersebut dapat menghambat kegiatan ekspor dan impor ekonomi kreatif tekstil dan pakaian jadi serta lokais tersebut merupakan jalur keluar masuk wisatawan. Pelonggaran juga dilakukan masih pada penyesuaian arahan pemerintah pusat dan protokol kesehatan.
2. Peningkatan SDM dan kualitas SDM dinas/ puskesmas agar memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan primer dan mental.
3. Pelonggaran mobilitas untuk penyediaan bahan pangan dan peningkatan angka pengangguran dengan penciptaan lapangan pekerjaan.
4. Penyediaan produk pangan lokal sehingga pada pada krisis Kota Bandung tidak lagi menggantungkan pasokan pangan dari luar daerah Kota Bandung.
5. Melakukan sosialisasi bursatenaga kerja kepada keluarga dan mahasiswa.
6. Pemberian pembekalan persiapan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital sehingga dapat leluasa akses ke pasar yang lebih luas.
7. Mempertimbangkan kualifikasi agar semua masyarakat dapat mengoperasikan elektronik digital.
8. Tidak melakukan perubahan anggaran pada pemanfaatan IT.
9. Meningkatkan layanan literasi yang menarik agar meningkatkan minat literasi masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Staregi tersebut dilakukan untuk mewujudkan penanganan permasalahan dampak sosial ekonomi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah dampak akibat pandemi Covid-19.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan:

1. Implementasi penangan dampak sosial ekonomi di Kota Bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung belum memenuhi dimensi pemulihan ekonomi, terjaminnya rumah tangga dan technology transformation. Pemerintah Kota Bandung belum memenuhi kriteria ekonomi makro dan mikro karena adanya hambatan pada kegiatan pengiriman dan pembutan komoditi ekspor tekstil dan pakaian jadi dan adanya penurunan wisatawan diakibatkan kurangnya koordinasi antar kebijakan sektoral sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung terbilang lambat. Kemudian pada dimensi rumah tangga juga belum bisa memenuhi kriteria karena tingginya angka pengangguran dan gizi buruk dan belum tersedianya layanan kesehatan alternatif untuk kelompok disabilitas hal tersebut dikarenakan penurunan wisatawan, tidak terosialasasikannya bursa kerja, layanan kesehatan yang terbatas dan tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah Kota Bandung. Kemudian yang terakhir, yaitu pada dimensi technology transformation belum bisa memenuhi kriteria, karena masyarakat masih belum siap penggunaan teknologi digital, terbatasnya peserta pelatihan IT dan layanan literasi yang kurang menarik.
2. Untuk menangani kegagalan tersebut, Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan 9 strategi penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, yaitu dengan penyesuaian arahan pemerintah pusat untuk melakukan pelonggaran mobilitas, peningkatan SDM dan kualitas SDM dinas/ puskesmas, pelonggaran mobilitas untuk penyediaan bahan pangan, penyediaan produk pangan lokal, melakukan sosialisasi bursatenaga kerja kepada keluarga dan mahasiswa, pemberian pembekalan persiapan masyarakat, mempertimbangkan kualifikasi pemilihan UMKM, tidak melakukan perubahan anggaran pada pemanfaatan IT, dan meningkatkan layanan literasi yang menarik.

Acknowledge

Penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, doa, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan tugas akhir ini. Dengan kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dengan tulis kepada Dr. Hani Burhanudin, Ir., M.T., Bapak Tarlani ST., MT, Ibu Dr. Yuli Asyiwati, Ir., Msi, dan Bappelitbang Kota Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Susilo A, Martin Rumende C, Pitoyo CW, Djoko Santoso W, Yulianti M, Sinto R, et al. TINJAUAN PUSTAKA [Internet]. Vol. 7, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia |. 2020. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucore/>
- [2] International Monetary Fund. World Economy Outlook [Internet]. International Monetary Fund. 2021. 40 p. Available from: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021>
- [3] Wei X, Li L, Zhang F. The impact of the COVID-19 pandemic on socio-economic and sustainability. *Environ Sci Pollut Res*. 2021;28(48):68251–60.
- [4] Bank W. Indonesia Economic Prospects Boosting the Recovery [Internet]. Washington, DC; 2021. Available from: <http://hdl.handle.net/10986/35762>
- [5] Fardani I, Tarlani, Aji RR. Analysis of Changes in Air Quality in Major Cities Indonesia during COVID 19 Using Remote Sensing Data. *IOP Conf Ser Earth Environ Sci*. 2021;830(1).
- [6] BPS. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 [Internet]. [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id). 2021. Available from: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- [7] Harimurti P, Prawira J, Hort K. The Republic of Indonesia Health System Review Asia Pacific Observatory on Health Systems and Policies. Vol. 7, Health Systems in

- Transition. 2017.
- [8] Tachjan H, Mariana D, Paskarina C, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (Bandung), Universitas Padjadjaran (Unpad). Lembaga Penelitian (Lemlit). Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah (Puslit KP2W). Implementasi kebijakan publik [Internet]. Paskarina C, Marina D, editors. Kota Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung; 2006. Available from: https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf
 - [9] OJK. Mempercepat Pemulihan, Menjaga Stabilitas [Internet]. 2021. Available from: [https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/financial-stability-review/Documents/Mempercepat Pemulihan%2C Menjaga Stabilitas.pdf](https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/financial-stability-review/Documents/Mempercepat_Pemulihan%2C_Menjaga_Stabilitas.pdf)
 - [10] OECD. The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis and recovery across levels of government. Secr OECD [Internet]. 2021;(May):1–140. Available from: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-and-recovery-across-levels-of-government-a2c6abaf/>
 - [11] Unicef, UNDP, Prospera, SMERU. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 pada Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia. SMERU Res Inst. 2021;1–7.
 - [12] Ilo T. Policy brief. 2020;(May):1–17.
 - [13] T I-M, K.B M, Godsell J, Adamu Z, Babatunde KA, Akintade DD, et al. A Critical Analysis of The Impacts of Covid-19 on The Global Enocnomy and Ecosystems and Opportunities for Circular Economy Srategies. Psychiatry Res [Internet]. 2020;14(4)(January):293. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7505605/>
 - [14] Barman A, Das R, De PK. Impact of Covid-19 in Food Supply Chain: Distrupction and Recovery Strategy. Curr Reseach Behav Sci [Internet]. 2021;(January). Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7987986/>
 - [15] Padhan R, Prabheesh KP. The Economics of Covid-19 pandemic: A Survey. Econ Anal Policy [Internet]. 2021;14(4)(January):293. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7505605/>